

**MODEL PENGUATAN PARTISIPASI
POLITIK PEREMPUAN
DEMI PARTAI POLITIK RESPONSIF GENDER**

**Moh. Ikmal
Mohammad Arifin**

Migrasi 2019

**MODEL PENGUATAN PARTISIPASI
POLITIK PEREMPUAN
DEMI PARTAI POLITIK RESPONSIF GENDER**

Penyusun

Moh. Ikmal

Mohammad Arifin

Tata isi: Marsus

Desain cover: Novie

Gambar cover: magdalena.co.

Cetakan ke-1, 2019

14 x 20 cm., 62 hlm

ISBN: 978-602-5803-54-3

PENERBIT MIGRASI

(Cv. Sulur Pustaka Grup)

Jl. Jogja-Solo Km.14, Candi Ssari, Rt.01/22

Tirtomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, 55571

Web: www.wulur.co.id

Telp: 0852-2929-9377

DAFTAR ISI

Pendahuluan -----
Ringkasan -----

BAB I. PELEMBAGAAN INSTRUMEN ORGANISASI INTERNAL PARTAI

- A. Pembentukan Dasar Organisasional Partai untuk Kesetaraan Gender -----
- B. Strategi yang Perlu Dilakukan -----

BAB II. FASE PRA PEMILIHAN

- A. Rekrutmen dan Nominasi Calon -----
- B. Upaya yang Harus Dilakukan -----
- C. Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilihan -----
- D. Strategi yang Harus Dilakukan -----

BAB III. FASE PEMILIHAN

- A. Kampanye dan Persiapan Pemilihan -----
- B. Strategi yang perlu dilakukan -----

BAB IV. FASE PASCA PEMILIHAN

- C. Manajemen Pemerintahan yang peka Gender -----
- D. Strategi yang perlu dilakukan -----

PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan tidak hanya sekedar menjadi instrument prasyarat pemajuan dan penegakan HAM, melainkan pula menjadi salah satu indicator demokratisasi suatu Negara berdasarkan inklusifitas pembangunan, keadilan, dan keberkelanjutan. Menjadikan sosok perempuan sebagai subjek pembangunan nasional yang harus dipertimbangkan berarti mendorong upaya pelibatan partisipasi politik mereka dalam segala aktivitas publik. Diantara upaya bagaimana mewujudkan tujuan tersebut salah satunya adalah kembali melakukan analisa strategis terhadap keberadaan partai politik. Keberadaan partai politik menjadi salah satu instrument penting dalam mendorong demokratisasi dalam segala aspek, Parpol menjadi instrument penting dalam mendorong peningkatan dan perluasan partisipasi tersebut.

Rendahnya partisipasi politik perempuan dapat kita lihat dari sejumlah temuan data dari sejumlah hasil penelitian-penelitian. Data yang dihimpun oleh Inter-Parlementary Union (2011) misalnya menyebutkan bahwa jumlah prosentasi kedudukan kursi perempuan yang hanya mencapai kurang dari 20% jelas menjadi keharusan partai politik untuk berusaha untuk mendorong pemberdayaan politik perempuan. Pada level global, posisi dan peran perempuan dalam partai politik

hanya menempati porsi 10% dari jumlah keseluruhan 40-50% anggota partai¹.

Menjamin terciptanya kesetaraan partisipasi perempuan dalam pembuatan keputusan partai dipandang merupakan aspek yang penting bagi keberlangsungan dan penguatan demokratisasi terutama dalam tubuh partai politik. Buku sederhana ini sengaja disusun dalam rangka mendorong para pihak baik para pimpinan, organisasi masyarakat sipil dan kalangan aktivis gender dalam menjadikan isu gender sebagai arus utama kebijakan partai. Upaya ini dapat dilakukan dengan berusaha menjadikan isu tersebut masuk dalam norma dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Buku ini juga menyuguhkan ringkasan penting bagi lembaga-lembaga dan organisasi social lain yang memberikan dukungan program kepada partai politik terutama dalam memperkuat peran dan partisipasi politik perempuan serta menjamin kesetaraan dan perluasan peran bagi kaum perempuan dapat diartikulasikan secara melembaga baik dalam lembaga pemerintahan, partai politik maupun lembaga swasta. Keberadaan mereka diharapkan mempengaruhi keputusan politik yang turut menentukan masa depan mereka sendiri.

¹ Inter-Parliamentary Union, (2011). Women in Parliaments: World and Regional Averages, diperoleh dari <http://www.ipu.org/wmn-e/world-arc.htm>

RINGKASAN

Jaminan konstitusional terhadap kaum perempuan terutama dalam bidang politik pada dasarnya telah dijamin oleh Undang-undang maupun dalam beberapa aturan konvensi internasional. Meski mendapatkan jaminan secara konstitusional upaya untuk mendorong partisipasi kaum perempuan dalam dunia politik mendapatkan tantangan yang cukup terutama bagaimana merumuskan hak yang abstrak menjadi suatu hal yang nyata. Partai politik adalah merupakan kunci bagaimana memperkuat peran dan partisipasi perempuan dalam politik melalui mekanisme rekrutmen dan pemilihan calon dalam menentukan agenda kebijakan suatu negara. Meski disadari bahwa peran dan partisipasi perempuan lebih banyak terwakili ditingkat akar rumput atau dalam jabatan pendukung namun kurang terwakili dalam jabatan yang memiliki kekuasaan. Kondisi demikian terjadi bagi kalangan perempuan dimana minim akses kepada jaringan yang berpengaruh, dan dengan sumber daya yang terbatas. Disamping keterbatasan akses kepada kelompok jaringan-jaringan berpengaruh maupun minimnya akses sumber daya, aspek lain yang menjadi tantangan bagi kalangan perempuan adalah minimnya dukungan keluarga dan terbatasnya teladan sekaligus mentor bahkan kurangnya dukungan masyarakat dan keluarga.

Bagaimana mendorong partisipasi perempuan dalam partai politik serta bagaimana partai politik membuka dan memperluas keterlibatan perempuan dan menjadikan isu kesetaraan gender dalam ruang public adalah merupakan aspek penentu utama pemberdayaan politik perempuan serta memastikan bahwa isu kesetaraan gender juga

dibahas dimasyarakat luas. Oleh karena itu untuk menjamin proses pelibatan perempuan dalam partai politik dapat berjalan efektif maka diperlukan upaya kelembagaan yang bisa dilakukan partai politik pada setiap tahapan tertentu dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan baik pada pra pemilihan, pada saat pemilihan, maupun pasca pemilihan. Disamping itu langkah-langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah melalui mekanisme kelembagaan dan pendanaan partai politik itu sendiri.

Beberapa upaya yang paling efektif dalam mendorong tingginya partisipasi perempuan dalam tubuh partai politik adalah melakukan reformasi structural ke lembaga politik dengan pelibatan dukungan para aktivis partai perempuan di dalam maupun diluar struktur partai politik itu sendiri. Sementara langkah-langkah lain adalah pelibatan dukungan dan calon serta pejabat perempuan yang terpilih. Beberapa upaya bagaimana mendorong partisipasi politik perempuan diatas tentu tidak bisa dilakukan sepihak, dukungan dan kerjasama dari pihak-pihak eksternal dan partai politik dari seluruh spektrum politik adalah suatu keharusan yang bisa dipertimbangkan.

Diantara upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam rangka mendorong partisipasi politik perempuan terbagi kedalam beberapa fase-fase tahapan intervensi yang dapat dilakukan partai politik yaitu sebagai berikut :



1. Memastikan proses input dari masing-masing pihak dapat terwakili di internal partai politik melalui komitmen partai dalam sebuah dokumen kelembagaan. Dokumen kelembagaan yang dimaksud adalah berupa pernyataan resmi suatu partai politik yang berisi kerangka kebijakan partai atas isu kesetaraan gender yang mengatur visi dan misi partai serta bagaimana mewujudkan visi dan misi tersebut. strategi organisasional partai secara internal dapat mencakup :
 - a. Menjadikan isu kesetaraan gender dapat masuk dalam kerangka hukum partai. Kebijakan ini mencakup upaya-upaya partai politik untuk mengadopsi pernyataan mengenai kesetaraan gender dalam dokumen pendirian partai

- b. Distribusi kuota kepengurusan dalam tubuh partai politik kepada kelompok perempuan dapat berlangsung secara seimbang.
 - c. Pada kegiatan-kegiatan kongres yang diselenggarakan partai, partai politik perlu menetapkan forum terpisah untuk delegasi perempuan saat kongres berlangsung.
 - d. Pembentukan sayap dan divisi khusus perempuan dalam tubuh partai, yang diintegrasikan secara resmi dalam struktur partai, dengan peran dan tanggung jawab yang jelas, dan diberikan dana yang memadai
 - e. Isu kesetaraan gender menjadi arus utama kebijakan internal partai.
2. Pada tahapan sebelum pemilihan, proses rekrutmen dan pencalonan adalah merupakan proses yang paling menentukan serta memastikan bahwa perempuan berpartisipasi dalam politik. Cara yang perlu dilakukan oleh partai politik adalah menetapkan aturan yang memberikan peluang besar bagi keterlibatan perempuan dan menjamin keterwakilan perempuan dapat diakomodir oleh partai politik. Upaya untuk mengakomodir posisi perempuan terakomodir dalam regulasi partai politik menjadi suatu keharusan formal kelembagaan partai politik. Ketika komitmen ini tidak tertulis dan Informal, maka akan sulit untuk mendorong partisipasi politik perempuan untuk masuk ke dalam lingkaran kekuasaan yang terdalam. Konsekuensi demikian juga turut mempersulit mekanisme akuntabilitas partai untuk mempertanggungjawabkan komitmen politiknya. Salah satu upaya untuk menjamin keterwakilan

perempuan dalam tubuh partai politik adalah dengan melakukan proses pemerataan kuota calon perempuan dalam lembaga perwakilan baik pada aspek jumlah delegasi, calon atau pejabat terpilih. Kebijakan distribusi pemerataan jumlah perempuan ini telah diadopsi oleh hampir lima puluh Negara yang ada. beberapa Negara mengadopsi kebijakan mengenai system penentuan kuota pencalonan dan menempatkan kandidat calon perempuan dapat berpeluang menang dalam kontestasi politik dari sekian calon yang ada.. kebijakan penentuan system kuota pencalonan perempuan hampir dilakukan oleh sebagian besar partai politik di dunia, ada sekitar 30 jumlah partai politik yang mengadopsi system kuota kandidat kuota pencalonan. Tentu kebijakan diatas hanya akan berhasil jika kandidat perempuan ditempatkan diposisi dengan peluang yang besar untuk menang dalam daftar calon partai. Oleh karena itu beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh partai politik dalam menjamin kesetaraan gender dalam rekrutmen calon dapat dilakukan melalui :

- a. Penggalangan dukungan partai untuk kuota pencalonan dan memasukkan kuota dalam anggaran dasar partai
- b. Penyusunan buku untuk rekrutmen calon dalam komite pencalonan partai
- c. Impelementasi dan penempatan perempuan dikursi yang peluang menangnya besar
- d. Pelibatan organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan pelaksanaan pemilu
- e. Pembentukan aliansi strategis dengan laki-laki dalam rangka membangun dukungan internal partai yang kuat.

- f. Pemberian pelatihan-pelatihan bagi calon perempuan
- g. Pelibatan internasional dan upaya berbagi pengalaman antara Negara dan kawasan

Disamping upaya diatas yang dilakukan oleh parpol, pada aspek pendanaan dan kampanye parpol, ketersediaan dukungan dana yang minim bagi parpol seringkali menjadi kendala penting bagi parpol dalam menjalankan mesin politiknya. Terutama dalam kegiatan-kegiatan kampanye politik perempuan pada saat kontestasi berlangsung. Perempuan tidak hanya berjuang untuk menggalang dana sendiri sebagai hambatan utama dalam perjalanan mereka. Tidak ada dukungan keuangan dari partai politik juga sering menjadi kendala serius dalam konteks peran dan keberadaan perempuan dalam sector public. Kondisi demikian harus diakui bahwa hal ini menyulitkan bagi perempuan untuk mendapatkan "modal awal," dana yang diperlukan untuk berkampanye sebelum terpilih. Oleh karena itu langkah yang harus diambil oleh partai politik maupun organisasi masyarakat sipil adalah penggalangan dukungan dana untuk kebutuhan pencalonan dan kampanye bagi perempuan. Menyediakan dana public untuk partai politik tentu merupakan perkara penting bagi mendukung keberlangsungan masa depan partai. terutama jika hal ini diatur untuk mendorong partai politik untuk memberdayakan perempuan, alokasi dana khusus untuk melatih calon perempuan dan mengkaji bagaimana public digunakan untuk mendukung calon dan isu perempuan adalah sesuatu yang urgen dalam melakukan perubahan secara kelembagaan partai agar lebih peka gender.

3. Sementara pada priode pemilihan, kemampuan calon memahami teknik berkampanye dan komunikasi yang efektif dengan konstituen mereka adalah merupakan aspek yang penting dalam rangka mengubah bahkan mendongkrak elektabilitas calon. Oleh karena itu pada masa pemilihan sedang berlangsung maka kesempatan bagi partai politik untuk mendidik pemilih tentang hak-hak perempuan untuk berpartisipasi dalam politik dan mengapa semua golongan masyarakat perlu memajukan kesetaraan gender. Oleh karena itu tindakan yang bisa diambil partai selama priode pemilihan ini mencakup :
 - a. Penggalana dana dan penyusunan pesan-pesan politik melalui pemanfaatan media dan komunikasi dengan pemilih;
 - b. Mendorong perluasan informasi sekaligus mempromosikan perempuan kepada pemilih
 - c. Melibatkan penggunaan media informasi yang memungkinkan calon perempuan selam kampanye diberikan ruang lebih dalam media tersebut
 - d. Restrukturisasi pengurus partai dengan memprioritaskan perempuan sebagai pihak yang mendapatkan posisi strategis
 - e. Melakukan proses pengawasan selama pelaksanaan pemilihan, termasuk yang harus dilakukan adalah dengan meminta kehadiran wakil partai perempuan di tempat pemungutan suara, terutama jika tempat pemungutan suara itu dialokasikan untuk perempuan saja;
 - f. Memperkuat opini public bahwa suara dan hak perempuan merupakan unsur penting dalam membangun budaya demokrasi

4. Sementara untuk mendorong keterwakilan perempuan dan menjamin kesetaraan gender pada pasca fase pemilihan adalah dengan melakukan beberapa upaya sebagai berikut :
 - a. Melakukan assessment pada partai politik terutama dalam aspek jaminan kesetaraan gender dalam partai. Proses assessment tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melakukan identifikasi, sekaligus berusaha untuk menghilangkan beberapa aturan-aturan yang banyak merugikan kalangan perempuan
 - b. Melakukan reformasi kultural pada partai politik seperti mengubah waktu sidang parlemen dan kalender parlemen untuk mengakomodasi anggota parlemen yang telah berkeluarga;
 - c. Memastikan bahwa isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi arus utama kebijakan dan garis perjuangan partai. Beberapa kebijakan yang bisa diambil dalam konteks ini adalah seperti menghapuskan kekerasan berbasis gender, atau memperhatikan hak-hak asasi yang sifat mendasar pada perempuan seperti cuti melahirkan, memperoleh keadilan, kesehatan, kebangsaan, buruh, hak tanah, jaminan sosial, dan waris;
 - d. Mendukung perluasan jaringan lintas partai dalam rangka untuk mendukung perempuan serta menjadikan isu kesetaraan gender menjadi arus utama pembangunan partai.
 - e. Menempatkan posisi dan peran perempuan dalam jabatan-jabatan strategis dalam lembaga-lembaga politik seperti ketua kelompok dan komisi partai
 - f. Menjalin kemitraan strategis dengan beberapa organisasi masyarakat sipil

Beberapa upaya diatas tentu tidaklah hanya disajikan dalam bentuk namun memerlukan praktek terbaik. Oleh karena itu dalam mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan dan menjamin pemajuan kesetaraan gender dapat terlaksana dengan baik adalah diperlukan keterlibatan laki-laki. Laki-laki adalah mitra penting untuk perubahan yang nyata. Upaya membangun dan memastikan jaminan kesetaraan gender dalam tubuh partai politik bukanlah menempatkan jumlah perempuan dalam politik lebih dominan dibandingkan jumlah pria, melainkan memastikan kesetaraan untuk semuanya.

BAB I

PELEMBAGAAN INSTRUMEN ORGANISASI INTERNAL PARTAI

A. Pembentukan Dasar Organisasional Partai Responsif Gender

Partai politik merupakan instrument politik penting dan legal bagi rakyat yang dijamin oleh konsitusi serta memiliki fungsi-fungsi dan tujuan tersendiri, kinerja dan fungsi partai pada dasarnya lebih banyak disebabkan oleh beberapa factor penentu yaitu aspek peraturan, mekanisme strategi partai dan bagaimana lingkungan eksternal dan internal partai itu sendiri. Kebijakan eksternal mencakup organisasi partai. Sementara kebijakan internal partai meliputi dasar ideologi partai, konstitusi dan undang undang yang digunakan terkait sistem pemilihan, masalah pendanaan partai dan sejarah, serta tingkat regulasi dan birokrasi internal, tingkat pemusatan terhadap tokoh, serta tingkat pengaruh pimpinan partai, dan tingkat desentralisasi.

Pada level internal partai, kualitas penilaian sebuah partai politik lebih banyak dihasilkan dari proses informasi organisasi dan kegiatan konsultasi internal, serta mekanisme aturan dan struktur (formal atau informal) internal partai politik. Disamping itu bagaimana pembuatan keputusan dalam partai dan keterbukaan fungsi partai di semua tingkatan juga

menjadi instrument penilaian untuk mengukur tingkat demokratisasi partai politik.²

Pada level organisasi partai, sikap inklusifitas terhadap beberapa kelompok yang kurang memperoleh pertimbangan apakah partai cukup representative dalam proses rekrutmen calon, dan bagaimana partai melakukan penjangkaran dan melibatkan perempuan dalam organisasi internalnya adalah merupakan suatu keniscayaan. Kondisii demikian tentu diperlukan dorongan kelembagaan internal partai yang menempatkan posisi perempuan yang duduk di jabatan perumus kebijakan strategis di internal partai politik, dan berusaha mereduksi dominasi kalangan pria dalam jabatan dan kegiatan pendukung partai di lapisan bawah.

Struktur dan penempatan jabatan kekuasaan partai politik bisa jadi informal dan terpusat bergantung pada keputusan pengurus pusat serta didukung oleh hubungan dan jaringan pengaruh yang terjalin kuat dan terkadang sulit untuk dapat diakses oleh pendatang baru, terutama perempuan. Rendahnya mentor yang terbatas, bahkan dengan diperkuat dengan keterbatasan dukungan keluarga dan masyarakat, dapat dipahami bahwa partisipasi perempuan dalam partai politik masih lebih rendah dari perempuan.

Oleh karena itu implemmentasi strategi untuk mendorong pemberdayaan perempuan dalam partai politik dapat membantu mendorong proses demokrasi dan partisipasi perempuan lebih inklusif. Beberapa upaya yang bisa dilakukan dalam rangka mewujudkan

² ACE, Roles and Definition of Political Parties, ACE Electoral Knowledge Network, diperoleh dari <http://aceproject.org/ace-en/topics/pc/pca/pca01/pca01a>.

impian diatas adalah dengan mengembangkan strategi kebijakan partai politik dapat menjadi lebih formal, misalnya melalui pemilihan posisi pimpinan atau rekrutmen calon untuk pemilihan mendatang lebih mempertimbangkan prinsip kesetaraan gender. Banyak partai juga bekerja aktif untuk kurang terwakili³.

Beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh partai politik dalam meningkatkan partisipasi kelompok yang termarginalisasi (perempuan) tentu dilaksanakan dengan beragam kebijakan mulai dari perubahan aturan-aturan hukum, hingga perubahan-perubahan internal partai seperti pembentukan divisi perempuan sebagai bagian dari struktur kepengurusan partai yang menjamin kehadiran perempuan dalam proses pembuatan keputusan dapat terwakili dengan baik. Disamping upaya pembentukan divisi diatas, strategi lain yang dapat membantu mendorong partisipasi politik perempuan adalah melakukan reformasi politik kelembagaan dengan langkah yang melibatkan diri mencari dukungan ke jaringan aktivis dan para calon atau pejabat perempuan yang terpilih. Strategi reformasi kelembagaan diatas akan dapat berjalan efektif jika mampu melibatkan kerjasama dari berbagai actor dan partai politik. Bagian ini membahas strategi yang dilaksanakan oleh partai politik agar lebih inklusif terhadap perempuan dan membahas perhatian kesetaraan gender dalam operasional internal.

³ ACE, Guiding Principles of Parties and Candidates, ACE Electoral Knowledge Network, diperoleh dari <http://aceproject.org/ace-en/topics/pc/pc20?toc>.

B. Strategi yang Perlu Dilakukan

Strategi ini pada dasarnya diperoleh dari hasil beberapa studi kasus dan penelitian lain yang dipandang terbaik sebagai buku kepada partai politik untuk mendorong kesetaraan gender dalam organisasi internal partai. Diantara beberapa strategi yang bisa dilakukan partai politik adalah sebagai berikut :

a. Internalisasi Kesetaraan Gender Dalam Peraturan Internal Partai.

Keberadaan peraturan internal partai memainkan peran penting sekaligus menjadi indikator bekerjanya mesin partai. Diantaranya peraturan internal partai yang dimaksud adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan partai politik. Mengadopsi prinsip kesetaraan gender dalam dokumen pendirian partai merupakan strategi utama partai dalam mendorong kerangka kerja politik partai lebih inklusif dan responsive. Beberapa partai politik dapat mencantumkan klausul kesetaraan gender dalam penyeteraan visi dan anggaran dasarnya. Misalnya di Negara El Salvador beberapa partai politik menyusun pernyataan misi dan kode etik untuk Farabundo Marti Front for National Liberation (FMLN) mencakup klausul kesetaraan gender untuk perempuan. Disamping penyebutan kesetaraan gender dalam anggaran dasar, peraturan, Citizen Action Party (PAC) di Kosta Rika membentuk kantor kejaksaan untuk kesetaraan gender yang ditugaskan untuk

memantau, melaporkan dan memberikan saran mengenai bagaimana regulasi di implemmentasikan⁴.

b. Pelibatan Partisipasi Perempuan Dalam Perumusan Kebijakan.

Keterwakilan perempuan dalam struktur pemerintahan dan pengambilan keputusan partai politik merupakan cerminan dari upaya partai untuk mendorong kesetaraan gender. Partisipasi kelompok perempuan dalam struktur pemerintahan partai menjadi penting karena beberapa alasan, yaitu untuk memberikan ruang dan partisipasi politik bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan, untuk memilih prioritas, serta strategi dan platform partai. Banyak pihak telah mengadopsi kebijakan ini, termasuk Partai Buruh di Australia dan Partai Sam Rainsy di Kamboja dengan sistem kuota internal yang menjamin partisipasi perempuan di beberapa dewan kepemimpinan mereka. Selain posisi kepemimpinan, partai politik dapat memastikan bahwa perempuan diangkat ke komite partai kunci dan kelompok kerja. Dalam beberapa kasus, kepala divisi perempuan adalah anggota komite eksekutif atau struktur lain yang terlibat dengan sumber daya partai, persiapan pemilihan, dan pemilihan kandidat. Memastikan partisipasi perempuan dalam struktur internal sangat penting untuk mempromosikan kesetaraan gender di partai politik. Namun, penting untuk dicatat bahwa langkah seperti kuota sebaiknya juga diikuti dengan inisiatif lain, termasuk penguatan

⁴ Llanos, Beatriz, & Kristen Sample, (2009) From Words to Action: Best Practices for Women's Participation in Latin American Political Parties, IDEA, diperoleh dari http://www.idea.int/publications/from_rhetoric_to_practice/en.cfm

kapasitas jangka panjang dan pengembangan ketrampilan, dengan tujuan memastikan bahwa perempuan mampu menduduki posisi pimpinan tanpa mekanisme kuota. Partai politik perlu melihat proses lain untuk melibatkan perempuan yang memiliki kualifikasi dan motivasi tinggi dalam jabatan kepemimpinan, dan memberi pemahaman kepada anggota mengenai pentingnya ruang yang mendukung dan terbuka untuk perempuan di dalam keanggotaan, kepengurusan dan struktur internal⁵

c. Menetapkan Target Partisipasi Dalam Kongres Partai

Kongres partai politik adalah merupakan media penting dalam proses politik yang berlangsung dalam sebuah partai politik, kongres menjadi media penentuan kebijakan dan keputusan utama untuk partai. Tidak hanya menjadi wahana penentuan kebijakan, bahkan kegiatan kongres yang diselenggarakan oleh partai politik juga membuka ruang bagi para pihak untuk membangun hubungan politik dan keuangan yang diperlukan untuk keberhasilan karir politik.

Bagi partai politik, kongres merupakan sarana penting sekaligus pemetaan target distribusi dan proporsi delegasi keterwakilan perempuan dapat terserap. Misalnya, di Amerika Serikat Partai Demokrat telah mengadopsi kebijakan representasi tokoh perempuan dalam tubuh partai ditingkat nasional. Konstitusi partai mengharuskan bahwa delegasi konvensi untuk pencalonan terdiri dari jumlah yang setara antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, penyediaan akses dan peluang networking

⁵ Llanos & Sample, 2009, *op. cit.*, hal. 32.

bagi kaum perempuan melalui penyelenggaraan forum terpisah sangat dibutuhkan dalam kegiatan kongres tersebut. Di Australia misalnya, Organisasi Perempuan Partai Buruh tiap tahunnya melakukan diskusi mengenai kebijakan, lobi isu tertentu, dan membangun jaringan. Di El Salvador, Sekretariat Perempuan FMLN menyelenggarakan kongres khusus pimpinan perempuan, menggabungkan pengurus dan anggota partai untuk menyusun strategi dan kebijakan untuk kesetaraan gender. Penting diperhatikan bahwa keputusan digunakan oleh partai sebagai buku untuk masalah kebijakan.

d. Pembentukan Divisi Dalam Tubuh Partai.

Berdasarkan hasil observasi dan kerja lapangan, menunjukkan bahwa pembentukan divisi perempuan dapat membuka ruang dan peran perempuan untuk bertemu, bertukar dan mendiskusikan masalah. berpesta. Pembentukan divisi perempuan merupakan bagian internal dari peningkatan keterwakilan perempuan dan perluasan partisipasi perempuan dalam partai politik dan proses umum⁶.

Oleh karena itu, pembentukan segmen perempuan tersebut di atas akan membutuhkan integrasi kelembagaan dalam struktur kepartaian. Memberikan peran dan tanggung jawab yang jelas serta memastikan dukungan finansial untuk biaya operasional tentunya akan mendorong peran mereka menjadi lebih maksimal. Upaya mendorong keterwakilan perempuan dalam struktur kelembagaan

⁶ iKNOW Politics, (2007). Consolidated Response on Establishing Women's Party Sections, diperoleh dari <http://www.iknowpolitics.org/node/3527>

partai merupakan salah satu mekanisme penting untuk mendorong proses reformasi kelembagaan partai dan mendorong peningkatan partisipasi perempuan yang efektif, khususnya memberikan tekanan kepada partai untuk melakukan reformasi dan peningkatan partisipasi perempuan., menerapkan sistem kuota pengangkatan perempuan dalam partai, dan merancang program pelatihan terkait peran perempuan. peran perempuan dalam partai tersebut.

Meski demikian, reformasi kelembagaan dalam tubuh partai dengan mengusung kesetaraan gender dalam tubuh partai tentu harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang agar agenda kesetaraan gender dalam tubuh partai tidak menjadi `pemecah` dalam divisi perempuan, dan jangan sampai divisi ini disisihkan dalam partai. Beberapa strategi yang bisa dilakukan dalam mencegah perpecahan tersebut adalah dengan memastikan posisi sekretaris atau ketua divisi perempuan memiliki kursi dan suara dalam dewan kepengurusan partai. Menjamin perspektif kesetaraan gender dapat menjadi arah prioritas pengembangan kebijakan partai sebagaimana dijelaskan diatas bahwa keberadaan divisi perempuan memiliki fungsi penting dalam pengembangan kebijakan dalam partai. Oleh karena itu untuk memastikan keberadaan perempuan dan pembentukan divisi perempuan ini dapat bekerja secara maksimal maka partai politik harus menjamin bahwa kebijakan dan prioritas mereka mampu merespon kebutuhan laki-laki dan perempuan secara berkeadilan, upaya ini tidak hanya dari aspek reformasi hukum dan produk kebijakan partai secara khusus, namun juga memastikan bahwa isu gender harus menjadi arus utama ke dalam semua kebijakan

partai. Hal ini dapat dicapai melalui komite kebijakan yang membahas pengarusutamaan gender dan menyetujui semua kebijakan jika sudah patuh, atau melalui penguatan kapasitas untuk anggota partai. Hal ini dibahas dalam bagian tentang pemerintahan pada periode pasca-pemilu.

BAB II

FASE PRA PEMILIHAN

A. Tahap rekrutmen dan nominasi calon

Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan fungsi-fungsi rekrutmen. Rekrutmen politik menjadi salah satu tahapan penting dimana keberadaan dan kualitas kader partai turut serta menentukan kualitas kader maupun turut berkontribusi terhadap elektabilitas suara partai politik dalam pemilu.

Pada tahapan rekrutmen dan nominasi calon, hal yang perlu dilakukan partai politik adalah memastikan ketersediaan posisi perempuan dalam proses rekrutmen dan nominasi melalui peningkatan jumlah partisipasi perempuan. Partai politik merupakan jembatan penting untuk mencapai partisipasi yang berkualitas dan inklusif, karena partailah yang mengendalikan nominasi calon untuk jabatan terpilih.

Baik pada proses penentuan nominasi calon, jumlah perempuan yang terpilih hingga penempatan perempuan dalam urutan daftar calon serta proporsi perempuan yang berhasil terpilih dalam jabatannya memang terdapat perbedaan pada masing-masing partai. Perbedaan-perbedaan tersebut terjadi akibat dari perbedaan tingkat keragaman partisipasi dan ruang lingkup desentralisasi.

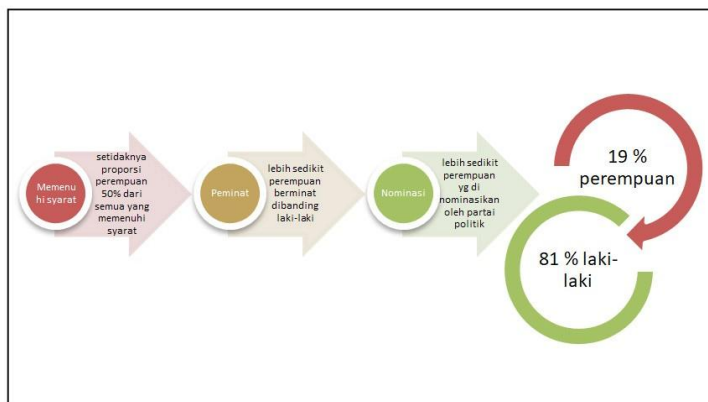
Selama proses pemilihan calon, partai politik dapat menetapkan mekanisme permintaan resmi untuk pendaftaran calon. Di beberapa negara, pemilihan kandidat di masing-masing negara dilakukan dengan mewajibkan pelamar memenuhi persyaratan hukum formal untuk menjadi anggota dewan. Namun, di beberapa negara lain, hanya sedikit orang yang secara sukarela

tertarik untuk menjadi kandidat. Beberapa faktor menentukan evaluasi seorang kandidat sebelum memutuskan untuk berkampanye, termasuk ketersediaan waktu, dukungan dana yang tersedia, pertimbangan peluang menang, ambisi pribadi, dukungan keluarga dan dukungan masyarakat dan akses ke dukungan dan pendanaan jaringan politik, remunerasi, status dan otoritas politik. Bagi mereka yang memenuhi persyaratan proses seleksi, kandidat yang dipromosikan partai memiliki akses gratis untuk memenangkan tantangan.

Dalam kontestasi penetapan calon, berbagai tekanan dapat muncul baik secara internal maupun eksternal. Berbagai kelompok kepentingan dapat hadir dan turut bermain dalam proses pengambilan keputusan. Tekanan eksternal yang muncul pada partai adalah seputar kelayakan bagi pemilih dalam menentukan dan mengevaluasi para calon manapun yang diyakini dapat memaksimalkan jumlah suara untuk partai⁷. Bagi calon perempuan yang dipandang memiliki elektabilitas perolehan suara yang rendah (umumnya perempuan) umumnya tidak akan dicalonkan oleh partai. Secara internal, beberapa pertimbangan utama bagi partai seperti *track record* kandidat, loyalitas pada partai, dan ketersediaan akses dukungan pendanaan adalah aspek penting bagi partai yang turut menentukan prioritas dalam seleksi para calon. Aspek popularitas calon seperti calon *incumbent*, karena namanya terkenal dan atau menonjol di masyarakat maupun dikarenakan profesi dan atau memiliki hubungan kekeluargaan tentu memiliki

⁷ Matland, Richard, (1998). 'Enhancing Women's Political Participation : Legislative Recruitment and Electoral Systems,' dalam International IDEA, Women in Parliament: Beyond Numbers, IDEA: Stockholm, Swedia., hal. 70.

peluang lebih besar dalam memperoleh dukungan dari partai⁸.



Kebijakan partai dalam proses penetapan calon tentu tidaklah sama dengan beberapa partai lainnya, perbedaan kebijakan partai dalam pemilihan calon biasanya ditentukan berdasarkan tingkat desentralisasi proses seleksi. Masing-masing partai memiliki mekanisme legal formal dalam menentukan nominasi calon.. Bagi perempuan, system penentuan nominasi berbasis birokrasi dan kebijakan partai dalam menjamin keterwakilan mereka tentu merupakan kebijakan yang dapat memberikan keuntungan. Oleh karena itu kebijakan tersebut memerlukan aturan-aturan secara tertulis agar kebijakan dan strategi partai dalam melakukan reformasi struktural dan kultural dalam mendorong partai responsive gender. Ketika aturan tidak tertulis maka akan kesulitan dalam menyusun dan melaksanakan strategi untuk masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Mekanisme aturan yang dibuat secara tertulis juga akan mempersulit

⁸ Ballington & Matland, 2004, *op. cit.*

dalam proses pertanggungjawaban partai. Kondisi internal partai yang lemah, tingkat demokratisasi internal dan skema kebijakan yang tidak jelas mengenai proses rekrutmen, tentu segala keputusan partai hanya akan menguntungkan sekelompok elit tertentu dan biasanya kalangan laki-laki. Perempuan bahkan dibiarkan diluar dan perannya dikesampingkan dari jaringan laki-laki. Kondisi demikian tentu merupakan bentuk system petronase politik dalam tubuh partai yang tentu sangat menutup dan menghambat proses keinginan perempuan untuk mencalonkan diri sebagai kandidat. Oleh karena itu proses nominasi calon harus dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan keterwakilan.

Oleh karena beberapa tantangan diatas dapat dilakukan melalui beberapa langkah-langkah seperti perlunya pengembangan insentif terutama menyangkut dukungan ketersediaan pendanaan bagi perempuan dengan tujuan untuk menarik perempuan masuk ke dalam lingkaran partai, disamping itu langkah berikutnya adalah penyediaan pelatihan atau pengembangan keterampilan bagi calon perempuan serta penetapan target kuota perempuan dalam partai dalam pencalonan dan nominasi

B. Strategi Yang Harus Dilakukan

Untuk mengurangi tingkat disparitas gender dalam proses rekrutmen calon dan nominasi calon maka beberapa upaya berikut dapat dilakukan seperti :

a. Dukungan Partai Politik Dalam penentuan Kuota Pencalonan dan Formalisasi Dalam Anggaran Dasar Partai.

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik mencerminkan komitmen dan arah

kebijakan formal partai. Sistem kuota berdasarkan prinsip kesetaraan gender dalam penyusunan anggaran dasar partai dan aturan parlemen tidak diragukan lagi merupakan aspek penting dalam mewujudkan visi kesetaraan gender di partai politik. Beberapa negara, seperti El Salvador, India, dan Maroko, termasuk di antara negara-negara yang telah memasukkan pernyataan dan peraturan misi dan piagam mereka dalam upaya mereka untuk mempromosikan kesetaraan gender dengan meningkatkan partisipasi politik perempuan.

b. Kejelasan Mekanisme Rekrutment Calon

Meski masing-masing partai memiliki aturan yang berbeda dalam proses rekrutmen, proses rekrutmen haruslah ditentukan secara jelas dan terbuka serta mengatur dengan jelas mengenai ketentuan dan jaminan bahwa partisipasi perempuan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu mekanisme rekrutmen ini harus diatur secara tertulis dan tidak disarankan proses pengambilan keputusan ini dikendalikan oleh segelintir pimpinan partai terutama kalangan laki-laki. Dominasi penguasaan kaum laki-laki dalam proses pengambilan keputusan tentu akan sulit bagi perempuan untuk berkompetisi secara seimbang dengan laki-laki karena mereka biasanya tidak masuk jaringan lelaki.

c. Menjamin calon perempuan berpeluang menang besar

Kuota pencalonan yang paling efektif dalam mekanisme pemungutan suara perempuan adalah dengan menetapkan kuota yang menempatkan perempuan dalam urutan di mana mereka dapat dipilih. Beberapa partai politik mengizinkan Anda

untuk mengatur persentase caleg perempuan dan daftar caleg partai. Misalnya, Sosial Demokrat Swiss baru-baru ini membuat "zebra" atau daftar pos bergantian antara kandidat pria dan wanita. Di Indonesia, PDIP menempatkan perempuan di daftar teratas di daerah pemilihan tertentu untuk memastikan pemilihan mereka pada tahun 2009. Jika kuota untuk partisipasi perempuan dijamin oleh undang-undang, mekanisme harus ada untuk memastikan bahwa KPU memiliki wewenang dan sumber daya untuk memantau penegakan kuota dan memastikan penuntutan dilakukan.

d. Kerjasama Dengan Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pengawasan

Selain KPU dan komite eksekutif partai, organisasi masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam proses pengawasan terhadap system kuota. Organisasi masyarakat sipil ini dapat memberi tekanan kepada partai politik untuk melaksanakan janji partai politik dalam melaksanakan pertanggungjawaban pimpinan.

e. Pembentukan Aliansi Strategis Dengan Pria

Dalam arena kontestasi politik pemilu, beberapa partai termasuk para calon yang diusung partai memiliki peluang dan kesempatan dalam merumuskan sekaligus mengatur strategi pemenangan calon. Kandidat, baik pria maupun wanita, juga bersaing dalam isu-isu seperti kuota kandidat dan kursi yang dipesan. Mereka memainkan peran kunci dalam membangun dukungan di dalam partai. Jika pimpinan partai bisa memahami hal ini dalam konteks partisipasi politik perempuan, tentu akan

menguntungkan semua pihak, terutama mengingat upaya reformasi mereka. Di Partai Buruh Australia, Partai Liberal Kanada dan Partai Sosialis Spanyol, perempuan Dia bekerja dengan para pemimpin partai laki-laki. untuk mendorong reformasi kuota. Di Meksiko, anggota PAN perempuan juga bekerja untuk mendidik dan mempengaruhi rekan laki-laki mereka untuk memajukan reformasi kuota dan mendapatkan dukungan dari kepemimpinan partai.

f. Memperluas Calon Perempuan Melalui Pelatihan

Kandidat, baik pria maupun wanita, juga bersaing dalam isu-isu seperti kuota kandidat dan kursi yang dipesan. Mereka memainkan peran kunci dalam membangun dukungan di dalam partai. Jika pimpinan partai bisa memahami hal ini dalam konteks partisipasi politik perempuan, tentu akan menguntungkan semua pihak, terutama mengingat upaya reformasi mereka. Di Partai Buruh Australia, Partai Liberal Kanada dan Partai Sosialis Spanyol, perempuan Dia bekerja dengan para pemimpin partai laki-laki. untuk mempromosikan reformasi kuota. Di Meksiko, anggota PAN perempuan juga bekerja untuk mendidik dan mempengaruhi rekan laki-laki mereka untuk memajukan reformasi kuota dan mendapatkan dukungan dari kepemimpinan partai.

g. Mendorong kerjasama Pengalaman Multilateral

Di beberapa negara transisi, dengan menekankan hubungan strategis dengan aktor internasional, partai politik mencari pengalaman di Eropa Barat atau Amerika Utara dan bergabung dengan kelompok partai internasional (International Party Groups). Untuk partai politik tertentu, misalnya, kudeta inklusif.

Partai politik yang mengaku lebih terbuka dan ingin bergabung, seperti Sosialis Internasional, didorong untuk mengambil tindakan untuk meningkatkan pemberdayaan politik perempuan.

C. Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilihan

Mendukung dana partai adalah salah satu cara untuk memastikan mesin partai berfungsi optimal dan program-program politik partai berjalan dengan baik. Jajak pendapat terhadap 300 anggota parlemen yang dilakukan oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) menemukan bahwa salah satu hambatan partisipasi perempuan dalam politik adalah terbatasnya sumber daya untuk mendanai kampanye, ternyata ada. Situasi seperti itu tidak jarang, bahkan ketika mereka harus membiayai sendiri kampanye mereka yang mahal dan menerima sedikit dukungan keuangan dari partai politik.

Status ekonomi perempuan umumnya lebih rendah daripada laki-laki, menciptakan kondisi bagi perempuan untuk menerima dukungan keuangan. Peran perempuan terbagi dan secara tradisional laki-laki adalah kepala rumah tangga, sehingga perempuan terbiasa mencari uang sendiri. Ketika perempuan tidak terbiasa mencari uang sendiri di sektor swasta. Laki-laki terhubung ke jaringan bisnis dan profesional yang dapat memberikan dukungan keuangan dan keahlian, memungkinkan mereka untuk berkampanye secara lebih efektif di luar struktur partai.

D. Strategi yang perlu dilakukan

a. Membentuk jaringan penggalangan dana

Bantuan dalam menyediakan dana dapat diberikan melalui jaringan perempuan dan organisasi penggalangan dana. Langkah-langkah tersebut sangat penting bagi perempuan yang kebijakan

pendanaannya memiliki dampak signifikan pada penggalangan dan mobilisasi dana. Jaringan pendanaan ini dapat memberikan modal awal untuk tahap awal pencalonan partai.

b. Dana public untuk partai politik

Pendanaan publik adalah salah satu mekanisme yang digunakan partai politik untuk mempromosikan dan memastikan kesetaraan di tingkat persaingan selama pemilu. Pendanaan publik kepada parpol yang dapat diberikan kepada parpol manapun, biasanya tanpa kewajiban kepada penerima, disesuaikan dengan sasaran pemberdayaan perempuan. Beberapa proposal juga telah diterapkan di Irlandia dan Ghana. Di Irlandia, skema umum Undang-Undang Pendanaan Politik, yang diamandemen pada tahun 2011, mengusulkan pengurangan separuh dana partai jika kurang dari 30% kandidat yang mewakili pemilihan nasional adalah perempuan.

Di Ghana, kelompok partai politik telah meningkatkan dukungan mereka untuk Dana Perempuan untuk membantu perempuan mencalonkan diri dalam pemilihan parlemen dan presiden. Dalam pernyataan konferensi multi-partai 2011, beberapa partai politik mengusulkan alokasi 10% dari dana publik untuk partai-partai yang secara khusus menargetkan perempuan, sehingga mengurangi biaya kandidat perempuan. Cara lain untuk secara tidak langsung menyediakan dana publik adalah melalui akses ke media swasta dan publik. Ini adalah bagian penting dari kampanye partai karena membangun hubungan antara kandidat dan pemilih.

c. Alokasi Dana Khusus Untuk Pelatihan Perempuan

Pemahaman kaum perempuan akan kondisi dan realitas kesenjangan gender dalam ruang public terutama dalam aspek kehidupan politik menjadi sesuatu yang penting. Kaum perempuan perlu menyadari sejarah kesenjangan dalam pengalaman politik yang ada. Keberadaan partai politik menjadi perantara sekaligus media sosialisasi politik yang efektif bagi mereka melalui skema kebijakan strategis partai melalui program pelatihan khusus bagi perempuan. Praktek semacam ini lazim dilakukan oleh beberapa partai politik di kawasan-kawasan Amerika Selatan.

d. Menerapkan Praktek Anggaran Yang Responsif Gender

Disamping melalui kegiatan berupa pelatihan bagi perempuan, pemanfaatan sumber daya partai, mempertimbangkan bagaimana sumber daya digunakan dalam kaitannya dengan perempuan, biaya partai dan manfaatnya bagi aktivis laki-laki dan perempuan Analisis bagaimana sumber daya digunakan Struktur partai merupakan aspek penting mempromosikan partisipasi politik khusus perempuan di ruang publik.

Penggunaan dana kampanye merupakan kegiatan yang penting. Oleh karena itu, partai politik dapat mengadopsi praktik penganggaran yang peka gender untuk memastikan bahwa perempuan mendapat manfaat dari pendanaan publik, seperti Serbia, yang berpartisipasi dalam komisi kesetaraan di tingkat lokal.

BAB III

FASE PEMILIHAN

A. Kampanye dan Persiapan Pemilihan

Partai politik dan kehadiran kandidat memainkan peran penting dalam proses pengurutan dan pengumpulan suara pemilu. Kerangka hukum dan administrasi pemilu, ditambah dengan perdebatan di bidang pemilu dan kampanye, desain strategi kampanye, dan faktor lingkungan politik dan budaya, tentu berdampak signifikan terhadap hasil pemilu. kampanye, meningkatkan dukungan kandidat dan mengambil tindakan untuk menjangkau pemilih. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kampanye pemilu, parpol dapat ikut serta dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu, termasuk proses persiapan dan penghitungannya.

Kampanye adalah intinya, dan itu juga merupakan peluang partai untuk menang. Setiap negara memiliki aturan yang berbeda mengenai prosedur pemilihan dan kampanye partai politik. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor penentu seperti: B. Bagaimana kerangka hukum, norma sosial dan budaya, latar belakang ekonomi, tingkat pembangunan, dan jenis sistem politik dibangun dan dioperasikan oleh negara.

Kampanye pemilihan nasional dapat menghabiskan dana yang besar dan bisa jadi sangat mahal bergantung pada variable-variabel diatas. Dibeberapa negara dimana jumlah penggunaan dana yang diperoleh berdampak pada keberhasilan kampanye. Oleh karena itu pada saat kampanye

berlangsung, tidak jarang para calon perempuan juga berjuang untuk mendapatkan tingkat sumber daya yang maksimal dimana calon perempuan biasanya tidak tampil saat kampanye, namun sama-sama memiliki akses yang seimbang dengan lelaki untuk memperoleh akses media. sementara pimpinan partai dan incumbent (biasanya laki-laki) mendominasi propaganda partai, waktu media, dan poster kampanye.

B. Strategi yang Harus Dilakukan

Bagaimana mendorong partisipasi politik perempuan dalam tahap atau fase pemilihan tentu memerlukan beberapa strategi tertentu. Strategi dibawah ini diciptakn dalam rangka memberikan gambaran bagi partai politik bagaimana menyusun strategi yang bisa dilakukan pada saat melakukan kampanye dan selama Periode Pemilihan. Selain itu, upaya tersebut dapat menjadi salah satu upaya dan langkah-langkah strategis bagi pembangunan yayasan partai, organisasi masyarakat sipil yang bekerja dengan mereka dalam mendukung partai. Diantara beberapa upaya yang harus dilakukan adalah :

1. Memberikan Pelatihan Dan Mentor Bagi Calon Perempuan

Peningkatan kemampuan calon dalam arena konstestasi pemilu terutama pada fasa kampanye dapat mendorong peluang kemenangan calon. Oleh karena itu melalui pendidikan politik bagi calon adalah aspek pertimbangan utama dalam meningkatkan peluang perempuan agar terpilih. Beberapa pelatihan yang bisa dilakukan oleh partai politik dalam meningkatkan peluang perempuan terpilih bisa dilakukan melalui

beberapa kegiatan seperti menggalang dana, penggunaan pesan atau isu politik yang bisa diterima masyarakat, penggunaan media, melakukan komunikasi politik dengan kalangan pemilih dan memastikan program yang ditawarkan dapat menjangkau mereka, membuat rencana kampanye. Disamping beberapa upaya yang bisa dilakukan diatas, perempuan yang ingin maju dalam kontestasi politik dapat mengambil manfaat dari perempuan yang telah ikut serta dalam kampanye pemilihan. Di Australia, Partai Buruh, melalui EMILY's List nya sendiri, membentuk program mentoring dimana calon baru dipasangkan dengan politisi yang lebih berpengalaman untuk tujuan ini.

2. Menempatkan posisi dan peran perempuan dominan dalam kampanye

Tahapan kampanye menjadi satu tahapan penting yang turut menentukan dalam mendongkrak elektabilitas suara. Kalangan aktivis dan calon perempuan dengan keterampilan yang dia miliki tentu sangat bermanfaat bagi partai potensi dan keunggulan yang mereka terkadang jarang diakui dan bahkan kurang dimanfaatkan semasa kampanye. Pada kegiatan pelaksanaan kampanye para kandidat perempuan Preferensi diberikan kepada pemimpin partai dan petahana terkemuka, yang biasanya tidak hadir selama kampanye pemilihan.

Oleh karena itu dalam rangka mendorong partisipasi perempuan dan memastikan bahwa partai politik berdiri diatas prinsip-prinsip kesetaraan gender maka yang perlu dilakukan

adalah meningkatkan kesadaran dan pengakuan calon perempuan dengan berpartisipasi dalam kampanye partai seperti: B. Perempuan digunakan sebagai pembicara dalam iklan televisi atau poster kampanye. Kampanye penjangkauan positif yang dijelaskan di atas dapat diandalkan untuk menghilangkan bias budaya dan sosial, terutama yang dipromosikan oleh media, dan menunjukkan manfaat yang diberikan partisipasi politik perempuan kepada masyarakat secara keseluruhan.

3. Identifikasi dan perluasan posisi partai atas isu prioritas perempuan

Kedudukan dan latar belakang partai menjadi pertimbangan terpenting dalam mengukur kedewasaan suatu partai. Keberadaan posisi partai tidak hanya membantu membedakan partai politik satu sama lain dan membantu partai politik membedakan diri dari isu, identitas atau kepribadian, platform juga dapat digunakan sebagai strategi untuk mengidentifikasi prioritas politik perempuan yang tepat. bertekad. Untuk memenangkan dukungan dari mereka yang pasti akan mempengaruhi suara perempuan dan kekuatan elektoral partai. Partai politik yang berada di garis depan dalam mempromosikan kesetaraan gender di parlemen dapat mengamanatkan agar perempuan mengambil cuti untuk merawat dan merawat anak-anak mereka. Ini sangat penting untuk mengamankan undang-undang kesetaraan gender, dan reformasi pemilu dapat meningkatkan akses perempuan ke parlemen dan agenda legislatif.

Tidak dapat dipungkiri bahwa politik kepartaian, di mana isu perempuan menjadi platform partai, akan berdampak langsung pada kekuatan elektoral partai itu sendiri. Sebab, perhatian caleg perempuan melalui parpol dapat menimbulkan masalah bagi pemilih perempuan. Partai politik yang dapat mengidentifikasi isu-isu politik memiliki posisi yang lebih baik untuk kepentingan pemilih perempuan dan lebih mungkin untuk memenangkan suara perempuan untuk calon mereka.

4. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pemilu

Partai politik harus memantau proses pemilu dan memeriksa apakah dugaan pelanggaran seperti suap suara, intimidasi pemilih, perusakan surat suara, dan administrasi pemilu yang buruk adalah fenomena umum dari administrasi pemilu. Saya memiliki banyak tanggung jawab untuk mengawasi prosesnya. Fenomena seperti itu tentu akan membahayakan kredibilitas pemilu mendatang. Sektor keamanan yang kurang kondusif tersebut di atas tentu lebih mengganggu pemilih dan calon perempuan daripada calon laki-laki. Kekhawatiran dan risiko ini mungkin muncul terutama di daerah-daerah di mana kekerasan berbasis gender terjadi, dan dapat meluas ke pemilu di negara-negara pasca-konflik.

Untuk memastikan bahwa setiap tahapan berjalan dengan baik, maka partai politik bertanggung jawab untuk merekrut dan melatih pemantau partai, dan dapat secara aktif merekrut perempuan sebagai pengawas. Ini sangat penting di tempat pemungutan suara khusus perempuan.

Kehadiran laki-laki di tempat pemungutan suara dan intimidasi terhadap pemilih dapat dilarang.

5. Aksesibilitas Informasi Pemilih Yang Peka Gender

Memastikan bahwa posisi dan isu kesetaraan gender terbentuk di dalam partai politik, dan dengan demikian keberadaan partai politik Selain memantau dan memastikan keamanan di setiap tahapan pemilihan, partai politik harus memastikan bahwa pemilih: Juga berperan penting dalam memberikan pendidikan kewarganegaraan ke Pendukung mereka terdaftar dan dapat memilih pada Hari Pemilihan. Partai politik juga dapat menginvestasikan sumber daya dan waktu untuk mengambil tindakan dengan mendidik pemilih, mengirim pesan kepada perempuan, dan memastikan perempuan mengetahui prosesnya. masyarakat.

BAB IV

FASE PASCA PEMILIHAN

A. Manajemen Pemerintahan Berbasis Peka Gender

Demokrasi pada hakekatnya memberikan ruang dan jaminan kebebasan dan kemerdekaan pada masing-masing individu dalam mewujudkan kebaikan dan cita-cita bersama. Oleh karena itu system politik yang inklusif dan responsive terhadap hak-hak kelompok perempuan merupakan bagian dari prasyarat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan demokratis dimana masing-masing pihak mendapatkan ruang dan kesempatan yang sama. Diterimanya prspektif perempuan dalam ruang public adalah merupakan prasyarat penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan demokratis. semakin banyak perempuan diparlemen setidaknya semakin mengangkat isu perempuan dan mengubah dinamika gender dikamar parlemen.

Keterwakilan perempuan dalam parlemen tersebut merupakan aspek penting sekaligus media representative untuk mewakili kepentingan dan hak-hak kelompok perempuan dalam ruang public. Tanpa kehadiran perempuan di parlemen dan badan legislatif lainnya, tentu keberadaan partai politik sebagai sarana pendidikan politik memiliki peran penting untuk menanamkan kesadaran literasi politik kepada mereka, partai politik perlu proaktif dan memastikan bagaimana kesetaraan gender dapat hadir dalam tubuh partai melalui system rekrutmen kepengurusan.

Menempatkan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi karena partai politik memiliki peran

dan fungsi strategis tidak hanya sebagai sarana komunikasi politik, melainkan bisa melakukan fungsi rekrutmen, pendidikan politik dan artikulasi kepentingan. Menyadari bahwa partai politik berperan besar dalam mengubah isu-isu strategis menjadi agenda kebijakan-kebijakan public maka keberadaan partai politik tersebut memiliki pengaruh besar dalam memilih isu yang dibahas, lalu kemudian merumuskan strategi kebijakan, memilih prioritas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu posisi partai politik memiliki peran strategis dalam mengatasi kekhawatiran perempuan. Pada dasarnya partai politik memiliki ragam sejarah yang berbeda dari sisi kepengurusan terutama bagaimana kemampuan partai politik dalam mendorong isu kesetaraan gender sekaligus menjadikan isu tersebut sebagai strategi kebijakan utama kebijakan partai.

B. Strategi Yang Harus Dilakukan

Isu kesetaraan gender pada tahapan pasca pemilihan menjadi aspek yang tidak terpisahkan juga dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan partai politik yang inklusif dan responsive. Strategi-strategi di bawah ini dapat memandu partai-partai politik tentang langkah-langkah mana yang harus dipilih dan diterapkan untuk memastikan kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan pasca-pemilu dan untuk memastikan mereka memasuki arus utama politik partai. Selain itu, strategi ini juga dapat menginspirasi lembaga sosial lainnya, seperti organisasi masyarakat sipil, untuk bekerja sama dan mendukung partai politik. Diantara beberapa langkah sebagaimana dijelaskan diatas yang bisa dilakukan partai adalah :

1. Melakukan Assessment Kesetaraan Gender.

Riset evaluasi sangat penting bagi partai politik untuk merumuskan strategi pemberdayaan perempuan dengan melakukan riset internal seperti kegiatan riset, FGD, jajak pendapat dan evaluasi hasil pemilu. Selain melakukan kegiatan evaluasi yang diuraikan di atas, langkah-langkah regulasi dapat melakukan upaya lain untuk mendorong kepemimpinan partai politik yang responsif dan peka gender. Pembahasan kesetaraan gender dalam konteks pengaturan partai politik dapat mencakup aturan-aturan yang berkaitan dengan fungsi, kebijakan dan tugas partai, serta status perempuan di dalam partai. Status dan jumlah perempuan di partai politik merupakan aspek penting dalam menilai keberadaan perempuan. Partai politik dapat mencoba memperbarui arsip yang datanya dipisahkan berdasarkan jenis kelamin. Setelah pemilu, partai politik dapat mengambil manfaat dari mengevaluasi kinerja mereka sendiri dan mempertimbangkan isu-isu gender selama periode pemilu.

Kebijakan regulasi yang berorientasi kesetaraan dalam organ partai tersebut di atas pada dasarnya dilakukan untuk menilai apakah praktik atau regulasi tersebut secara langsung atau tidak langsung merugikan perempuan dalam pemilu. B. Calon Dana; atau aturan rekrutmen. Sebaliknya, kebijakan dan rencana strategis dapat dikembangkan dan disesuaikan pada temuan assessment tersebut. Kebijakan partai baru dapat diadopsi atau bahkan dilakukan reformasi kapan saja. Upaya reformasi tersebut memiliki

keuntungan strategis dari upaya yang dilakukan pada periode pasca pemilihan. Misalnya di Kanada, *New Democratic Party* (NDP) telah menyelesaikan audit keragaman di salah satu propinsinya setelah pemilihan, dimana anggota kelompok pemilih yang kurang terwakili dapat mengembangkan rencana tindakan (*action plan*) untuk mencalonkan lebih banyak perempuan di daerah pemilihan dengan peluang menang yang cukup besar. Di Kirgistan, analisa gender pernyataan partai politik dan assessment situasi perempuan dalam politik di tingkat nasional dan local dilakukan oleh lembaga bantuan internasional dan organisasi masyarakat sipil.

2. Melakukan Pelatihan Kepada Pejabat Terpilih

Bagi kandidat terpilih, menjadi seorang politisi dan bekerja diparlemen tentu merupakan pengalaman baru. Oleh karena itu keberadaan sekretariat parlemen menempati peran penting dalam rangka memberikan pelatihan pengenalan kepada anggota baru. Partai politik sering memberikan pelatihan kepada anggota dewan tentang fungsi partai dalam setting parlemen. Pelatihan ini dalam rangka memberikan gambaran keterampilan umum bagi anggota perempuan untuk menavigasikan antara prosedur yang ada.

3. Reformasi Kelembagaan Parlemen Peka Gender

Keberadaan parlemen yang berisi para kandidat yang terpilih dan diusulkan melalui partai politik harus kita akui bahwa dalam parlemen terdiri beberapa kelompok-kelompok

partai politik. Sebagai sebuah kelompok partai politik diparlemen, partai memiliki peran strategis dalam mengubah budaya diparlemen, termasuk budaya politik responsive gender. Keterlibatan perempuan dalam ruang public terutama dalam parlemen tentu keberadaan Mereka cenderung terjerumus ke ranah isu gender.

Upaya menciptakan lingkungan politik yang demokratis dan peka gender tentunya membutuhkan kerangka kondisi di mana perempuan dapat secara aktif berkontribusi dan memfasilitasi partisipasinya. Reformasi tertentu yang dapat dilaksanakan untuk memfasilitasi partisipasi yang lebih besar dari anggota parlemen perempuan berkaitan dengan isu-isu seperti waktu dengar pendapat parlemen, lokasi fasilitas untuk anggota parlemen perempuan, dan pemberian cuti orang tua. Kebijakannya adalah partisipasi perempuan.

Di beberapa negara, termasuk Afrika Selatan, anggota faksi perempuan Kongres Nasional Afrika, ketika mereka menjabat pada tahun 1994, menyatakan perlunya reformasi kelembagaan parlemen. Mereka menyerukan jadwal legislatif untuk menyelaraskan dengan jadwal sekolah sehingga anggota parlemen dapat beristirahat dan menghabiskan waktu dengan pemilih pada hari libur sekolah. Mereka juga mendorong supaya pembahasan selesai lebih awal pada malam hari untuk mengakomodasi anggota dewan yang sudah berkeluarga, atau ada fasilitas penitipan anak.

4. Memastikan pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan dalam kebijakan partai.

Partai politik memiliki peran penting dalam mendorong pengarusutamaan gender dalam ruang parlemen. Keberadaan partai politik menjadi penentu prioritas dan agenda legislative. Salah satu upaya partai politik dalam mendorong pemberdayaan partisipasi perempuan bisa dilakukan melalui dua cara :

- a. Memfasilitasi reformasi politik partai politik tertentu melalui langkah-langkah penghapusan kekerasan berbasis gender dan prioritas partai, cuti orang tua atau hak reproduksi;
- b. Memastikan bahwa perspektif gender tercermin dalam semua debat kebijakan dan prioritas partai, termasuk mempromosikan kesetaraan gender di bidang akses terhadap keadilan, kesehatan, kewarganegaraan, hak atas tanah, keamanan dan warisan. Kongres juga dapat memastikan bahwa kewajiban internasional, seperti yang diatur dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, tercermin dalam undang-undang domestik yang positif dan tindakan pemerintah.

5. Memastikan akses perempuan terhadap peluang dan retensi

Keberadaan jumlah perempuan di parlemen selalu mengalami fluktuasi naik dan turun selama masa jabatan parlemen. Perubahan jumlah dan keberadaan perempuan bisa

disebabkan karena anggota perempuan mungkin mengundurkan diri atau menjabat sebagai menteri. Dalam situasi ini (dimana pemilihan antar waktu tidak dilakukan) maka partai politik dapat memastikan bahwa perempuan yang mengundurkan diri atau karena sebab lain dari jabatannya diparlemen dapat digantikan dengan perempuan jika kursi kosong. Oleh karena itu Partai politik juga harus memastikan bahwa kursi yang kosong akan diisi perempuan untuk meningkatkan proporsi anggota perempuan. Partai politik juga dapat mempertimbangkan pemilihan berikutnya. Biasanya ada tingkat turnover yang lebih cara dimana perempuan dapat mempertahankan kursinya diantara anggota perempuan dibandingkan laki-laki, dan yang diperlukan dapat membalikkan trend ini.

6. Dukungan Jaringan Lintas Partai di Parlemen

Realitas partisipasi perempuan diruang public disadari oleh sebagian besar kalangan politisi perempuan di seluruh dunia. Mereka menyadari bahwa sebagai kelompok minoritas diparlemen, koalisi dan aliansi untuk membentuk perubahan kebijakan diparlemen turut menentukan terhadap reformasi kebijakan berbasis gender.

Komisi Perempuan adalah forum yang efektif untuk menyatukan perempuan dari partai politik yang berbeda untuk menyuarakan keprihatinan dan keprihatinan mereka dan untuk menginformasikan pembuatan kebijakan dan pengawasan pemerintah terhadap kesetaraan

gender. Kegiatan kaukus ini dapat membantu anggota parlemen perempuan dengan menganalisis RUU, melakukan audiensi dengan organisasi masyarakat sipil, dan mengadakan lokakarya tentang isu-isu tertentu.

7. Jaringan Kemitraan Strategis Dengan Organisasi Masyarakat Sipil

Selain kemitraan antar parpol di parlemen, kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil juga tak kalah pentingnya. Pembentukan koalisi politisi perempuan dan masyarakat sipil akan meningkatkan efektivitas perubahan tata pemerintahan. Dalam banyak kasus, terutama ketika partai berusaha mengubah konstitusi atau undang-undang untuk memberdayakan perempuan. Aktivis di dalam partai politik telah bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk mencapai tujuan mereka. Organisasi masyarakat sipil dapat secara strategis menargetkan aktivis partai perempuan untuk memperjuangkan perubahan kebijakan yang diinginkan dalam kedua skenario. Organisasi masyarakat sipil dapat menekan pemerintah dan menyuarakan tuntutan masyarakat.

8. Membangun kesepahaman dan kemitraan bersama kepada anggota partai dan laki-laki.

Upaya mendorong perubahan tata kelola gender di atas bertujuan untuk melembagakan kesetaraan gender melalui reformasi aturan dan prosedur partai yang dilaksanakan oleh anggota partai, khususnya anggota fraksi di parlemen. Harapan partai, seperti menetapkan tujuan

tertentu dan membuat komitmen politik yang jelas, tidak banyak berpengaruh kecuali jika disertai dengan dukungan dan persetujuan dari anggota partai laki-laki dan perempuan. , bahwa laki-laki adalah kelompok mayoritas di parlemen dan mendominasi struktur kepemimpinan partai. . Oleh karena itu, kehadiran laki-laki merupakan mitra penting bagi perubahan. Saling mendukung dan memahami ini tentunya membutuhkan proses pelatihan internal untuk membekali para anggota, khususnya laki-laki, dengan pemahaman tentang kesetaraan gender. Pelatihan orientasi merupakan bagian dari upaya partai untuk mendorong saling pengertian dan biasanya diberikan kepada anggota parlemen baru. Kegiatan orientasi harus mencakup ketentuan untuk kesetaraan gender. Kegiatan pelatihan orientasi di atas tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan dan visi pimpinan partai. Di Spanyol, di mana pemimpin PSOE Zapatero menyatakan dirinya sebagai feminis, citra feminisme dalam politik Spanyol berubah. Ini memiliki efek yang luas dalam menempatkan perempuan pada pijakan yang sama dengan laki-laki di dalam partai dan pada pijakan yang sama dengan rekan-rekan laki-laki mereka.

KESIMPULAN

Disparitas ruang dan peran perempuan dalam ruang public adalah realitas ketimpangan yang memerlukan langkah-langkah strategis dalam rangka mendorong peningkatan partisipasi mereka. Diterimanya perspektif perempuan dan partisipasi perempuan dalam arena politik praktis tentu bagian dari upaya mendorong pembangunan demokrasi lebih berkualitas dan berkontribusi terhadap penguatan good governance.

Oleh karena itu partai politik diyakini menjadi episentrum perubahan dalam rangka mendorong langkah-langkah inisiatif pemberdayaan perempuan di seluruh partisipasi mereka. Upaya pelibatan kaum perempuan dalam ranah politik tentu akan membawa manfaat besar secara politis selama siklus pemilihan berlangsung. Menghadirkan perempuan dalam ruang politik praktis berarti telah menempatkan keberpihakan agenda kebijakan public lebih bercorak adaptif dan responsive terhadap hak-hak kaum perempuan. Melalui reformasi terbuka dan resmi untuk mendukung partisipasi perempuan, partai politik dapat mengubah opini publik, melakukan penggalangan basis dukungan baru, menarik anggota baru, menarik arus pendanaan publik ke partai, dan meningkatkan citra mereka di negara lain, yang keseluruhan dari upaya diatas antara lain dapat memberikan keuntungan politis dan praktis.

Mengatasi hambatan partisipasi politik perempuan membutuhkan dukungan partai politik. Tetapi situasi ini membutuhkan tindakan positif. Karena bias gender begitu meresap di seluruh spektrum politik di setiap negara di dunia yang tercermin dalam kehidupan

sosial, ekonomi dan politik. Di banyak negara, masih sulit bagi perempuan untuk bersaing secara langsung dengan laki-laki, dan karena interaksi dan penampilan mereka di depan umum, kehadiran dan peran perempuan sangat kecil dan berdampak kecil pada kebijakan publik. Tidak Hanya peran yang mengganggu pengambilan keputusan adalah ditugaskan. Prasangka ini diperkuat dengan masalah global status ekonomi perempuan yang lemah dan kemiskinan, yang tentu saja menghambat kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Dalam beberapa kasus, sumber pendanaan yang minim, dengan sedikitnya perempuan yang menguasai sumber daya, tidak mampu mendanai kampanye mereka sendiri, dicalonkan atau dipilih dalam pemilu, Hal ini menjadi penghambat partisipasi perempuan di ruang publik. ke sumber daya untuk mendukung kampanye seperti: . Sumber daya eksternal, produk pengetahuan, jaringan pengaruh, panutan, dan mentor berpengalaman. Di dalam partai politik, bias ini tercermin dari terbatasnya jumlah perempuan dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan

REFERENSI

- ACE, Roles and Definition of Political Parties, ACE Electoral Knowledge Network, diperoleh dari <http://aceproject.org/ace-en/topics/pc/pca/pca01/pca01a>.
- ACE, Guiding Principles of Parties and Candidates, ACE Electoral Knowledge Network, diperoleh dari <http://aceproject.org/ace-en/topics/pc/pc20?toc>.
- Ballington, Julie, (2008). Equality in Politics: A Survey of Women and Men in Parliaments, Inter-Parliamentary Union, Geneva, Switzerland
- Inter-Parliamentary Union (2011), Women in Parliaments: World and Regional Averages, diperoleh dari <http://www.ipu.org/wmn-e/world-arc.htm>
- iKNOW Politics (2007), Consolidated Response on Establishing Women's Party Sections, diperoleh dari <http://www.iknowpolitics.org/node/3527>
- iKNOW Politics (2008), 'Consolidated Response on Working With Women Candidates and Women Voters During Elections,' Tersedia di <http://www.iknowpolitics.org/node/6490>
- Llanos, Beatriz, & Kristen Sample (2009), From Words to Action: Best Practices for Women's Participation in Latin American Political Parties, IDEA, diperoleh dari http://www.idea.int/publications/from_rhetoric_to_practice/en.cfm
- Matland, Richard (1998) 'Enhancing Women's Political Participation: Legislative Recruitment and Electoral Systems,' dalam International IDEA, Women in Parliament: Beyond Numbers, IDEA: Stockholm, Swedia

TENTANG PENULIS



Moh. Ikmal. Pria kelahiran Sumenep 06 Juni 1986 memulai bidang kepenulisan sejak ia tempuh jenjang pendidikan sarjana di Universitas Negeri Yogyakarta (2007-2011) konsentrasi jurusan pada bidang studi Pendidikan Kewarganegaran dan Hukum (S1)

Penguasaan disiplin konsentrasi jurusan pada bidang studi Pendidikan Kewarganegaran dan Hukum (S1) dan Ilmu Politik (S2) di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2014-2016). keilmuannya banyak ia tuangkan dalam sebuah karya-karya diantaranya aktif menulis kolom di beberapa media lokal di Yogyakarta [Harian Jogja, Koran Merapi, Jawa Pos (radar jogja)] dan juga ia tuangkan dalam Diseminasi Hasil Penelitian. Menjadi Pemenang Hibah Penelitian Kompetitif Tingkat Nasional, diantaranya Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-Penelitian DIKTI 2008 dan 2009). Dedikasinya sebagai dosen di STKIP PGRI Sumenep (2016-sekarang) ia tuangkan kedalam karya riset nasional diantaranya Hibah Penelitian Kompetitif Nasional Penelitian Dosen Pemula (PDP DIKTI

Mohammad Arifin. Lahir di Kabupaten Sumenep 07 Juli 1987. Seorang alumni pada program pascasarjana Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia ini banyak menggeluti disiplin keilmuan hukum secara teoritis dan praksis yang mendorong dia terlibat secara aktif dalam kegiatan

sehari-harinya sebagai Dosen di STKIP PGRI Sumenep sekaligus Advokat. Komitmen dan dedikasinya pada bangsa dan negara olehnya di tuangkan dalam sebuah karya penelitian yang dipublikasikan dalam beberapa jurnal, diantaranya Peranan Polisi Lalu lintas dalam memberikan pendidikan hukum untuk mewujudkan kesadaran berlalu lintas kepada masyarakat di kabupaten Sumenep (Jurnal Pelopor Pendidikan Vol 9, 2016), Pemenang Hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP DIKTI 2019) dengan judul perempuan dan politik (kajian representasi politik perempuan dan upaya partai politik dalam mendorong partisipasi politik perempuan di kabupaten Sumenep). Kritik dan saran demi perbaikan dapat disampaikan melalui email : Mohammad.arifin@stkipgrisumenep.ac.id.